

[Click here and write your Article Category](#)

Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIAKAD POLDA Jambi kepada Petugas *Command Center*

Adam Afriansyah, M.Kom¹, Ade Oktarino, S.Kom., M.S.I², Imti Tsalil Amri, S.Kom., M.Kom³, Brestina Gultom, S.Kom., M.S.I⁴, Rico, S.Kom., M.S.I⁵, Derist Tourino, ST., M.Kom⁶, Akhmad Faisal Husnino, M.Kom⁷, Ryan Anderson⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Universitas Adiwangsa Jambi

ARTICLE INFORMATION

Received: February 00, 00
Revised: March 00, 00
Available online: April 00, 00

KEYWORDS

Sosialisasi, Aplikasi SIKAD, POLDA Jambi, *Command Center*, Teknologi Informasi, Pengelolaan Data

CORRESPONDENCE

Phone: +62 (0751) 12345678
E-mail: first_author@affiliation.xx.xx

A B S T R A C T

Aplikasi SIKAD dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan komunikasi dalam rangka mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam pengawasan dan koordinasi di tingkat operasional. Sosialisasi ini dilakukan melalui pelatihan yang mencakup pengenalan fitur aplikasi, mekanisme penggunaan, serta manfaat aplikasi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan respons terhadap situasi darurat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petugas *Command Center* Polda Jambi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Evaluasi awal menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan petugas dalam menggunakan aplikasi SIKAD, yang berpotensi meningkatkan kinerja dan koordinasi operasional di lapangan.

INTRODUCTION

Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat dituntut untuk memproduksi dan berguna atau setidaknya tidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak memproduksi dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. Tindak kejahatan atau kerusuhan dapat merusak atau menghancurkan produktifitas dan dapat menghancurkan masyarakat. Dalam masyarakat modern tugas polisi adalah menjaga agar jalannya produksi yang menyejahterakan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur karena tindak kejahatan dan kerusuhan. Tercakup dalam pengertian menjaga jalannya produktivitas dan tujuan utama dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab (Suparlan 1999 b).

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Suparlan;1999). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama

dalam proses tidak dirugikan. Menurut Rahardjo, 2000 : "Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat.

Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya, perubahan dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya. Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, 1999).

Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab kusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar: 1994 :1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan

SASARAN DAN TARGET

Petugas *Command Center*.

METHOD

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dalam bentuk pelatihan yang mencakup pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan praktik langsung penggunaan aplikasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 30 November 2019 di Ruang Aula Polda Jambi.

RESULTS AND DISCUSSION

Mungkin banyak dari kita sering menonton film perang atau film yang berlatar belakang militer di mana terdapat adegan seorang pemimpin atau jenderal yang sedang mengawasi kegiatan anak buahnya, dan sesekali melakukan perintah melalui beberapa layar monitor yang terhubung ke kamera satelit di suatu ruangan yang dipenuhi peralatan komunikasi canggih lainnya. Ruangan tersebut biasa disebut dengan *Command Centre* (CC) dan tentunya *Command Centre* tidak hanya ada dan dibutuhkan di dunia militer tapi juga ada dan dibutuhkan di dunia sipil (nonmiliter) seperti di pemerintahan, pengelola kawasan seperti bandara, pelabuhan, terminal, kawasan industri dan lainnya.

Secara umum *Command Centre* dapat diartikan sebagai suatu tempat atau lokasi untuk menyediakan perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan cepat dalam mendukung atau merespons kejadian penting. Dari sisi perusahaan, *Command Center* merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan *Crisis Management* atau *Business Continuity Management*. *Command Center* adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, di mana seorang direktur atau pengambil keputusan bersama-sama dengan tim, untuk melakukan pertemuan, mengambil keputusan menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi perusahaan, di antara lainnya meliputi tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaaan, dan langkah penyediaan informasi publik.

Melihat pentingnya fungsi *Command Centre* saat ini, banyak pemerintah daerah baik kota atau kabupaten yang membangun *Command Centre* untuk mendukung operasional pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan *Command Centre* juga dijadikan sebagai salah satu ikon implementasi *Smart City* di suatu daerah.

Pengoptimalan *Command Center*

Pembangunan *Command Centre* memang bisa dijadikan sebagai inisiatif digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi harus diikuti dengan pemanfaatan yang optimal dari *Command Centre* tersebut. Nyatanya, banyak *Command Centre* yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti misalnya hanya berfungsi sebagai monitor CCTV atau bahkan layar untuk *video conference* dan *online meeting*. Padahal

sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/ gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 1999). Menurut Bayley 1994, untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak polisi yang konvensional—yang dilibat oleh birokrasi yang rumit, mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain (Kunarto, 1998,xi).

Dari bahasan diatas fungsi polisi bukanlah sebagai alat penguasa atau hanya untuk kepentingan pejabat pemerintah. Di dalam menciptakan tertib hukum, keamanan tidak dapat lagi dengan menggunakan kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter militeristik. Dalam masyarakat yang otoriter militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri (Van den Berge, 1990, dalam Suparlan, 2001). Hampir di semua negara yang otoriter, gaji pegawai negeri sipil, polisi dan militer amat kecil, yang besar adalah fasilitas dan pendapatan atau tunjangan yang diterima karena jabatan yang didudukinya (Suparlan, 2001). Hal tersebut di dalam organisasi kepolisian dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya sistem yang tidak fair dan orientasi para anggotanya bukan pada pelayanan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan kepolisian yang demokratis dan cocok dengan masyarakatnya. Dengan mengacu pada acuan dasar demokrasi polisi dapat menunjukan adanya kesetaraan antara masyarakat dengan aparat kepoliciaannya, polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya dan dalam tindakan pemoliciaannya senantiasa berdasar pada supremasi hukum serta memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Adanya transparansi atau keterbukaan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban publik polisi (tidak lagi menganggap semua tugas polisi rahasia dan harus dirahasiakan).

Untuk mengawasi dan mengontrol kinerja polisi agar tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku perlu adanya lembaga yang independent untuk melakukan pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi dengan harapan agar polisi dalam memberikan pelayanan keamanan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Dengan demikian maka prioritas pemolician tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja melainkan juga melihat harapan dan keinginan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Gaya pemolician yang dilakukan tidak lagi bersifat reaktif atau menunggu laporan/pengaduan atau perintah melainkan proaktif dan senantiasa menumbuhkan kreativitas dan inovasi –inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menentukan gaya pemolician yang terbaik bagi masyarakat tidak hanya ditentukan atau diatur dari atas saja (top down) yang diatur secara sentralistik atau diseragamkan melainkan tumbuh atau muncul dari tingkat bawah yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya atau dengan sistem bottom up (desentralisasi).

TUJUAN

REFERENCES

- [1] Suparlan, P. (1999). *Peran Polisi dalam Masyarakat Modern: Menjaga Produktivitas dan Keamanan*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- [2] Rahardjo, S. (2000). *Fungsi Polisi dalam Masyarakat: Dari Otoriter ke Demokratis*. Jakarta: Penerbit ABC.
- [3] Bahtiar, A. (1994). *Penegakan Hukum dan Keamanan Masyarakat*. Bandung: Pustaka Utama.
- [4] Bayley, D. H. (1994). *Police and Policing: Contemporary Issues*. New York: McMillan.
- [5] Kunarto, S. (1998). *Transformasi Kepolisian: Dari Militeristik ke Demokratis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- [6] Van den Berge, J. (1990). *Kekuasaan dan Kekerasan dalam Masyarakat Otoriter*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- [7] Suparlan, P. (2001). *Kepolisian dalam Konteks Masyarakat yang Berkembang*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- [8] SKOTA by Lintasarta. (2019). *Pengoptimalan Command Centre dalam Pemerintahan Daerah: Solusi Teknologi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik*. Lintasarta. Diakses dari <https://www.lintasarta.net>.
- [9] Poldam Jambi. (2019). *Laporan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIKAD untuk Petugas Command Center*. Jambi: Poldam Jambi.

fungsinya bisa lebih dari itu mengingat biaya investasinya yang tidak murah.

SKOTA by Lintasarta memberikan solusi untuk *Command Centre*, dari pembangunannya sampai pengoptimalan *Command Centre* itu sendiri sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari sisi pengoptimalannya, SKOTA by Lintasarta akan memberikan solusi berupa platform *Command Centre* atau SKOTA Data by Lintasarta yang akan membuat *Command Centre* menjadi sangat bernilai sesuai definisinya untuk pengambilan keputusan berdasarkan pengumpulan (feeding dan supply) data yang dibutuhkan.

Platform Command Centre akan berbasis pada integrasi data dari berbagai sumber yang akan diolah dan ditampilkan sesuai kebutuhan secara real-time dan dapat berfungsi sebagai dashboard yang sangat dibutuhkan oleh seorang pengambil keputusan.

Fitur dari platform *Command Centre* atau SKOTA Data by Lintasarta di antara lainnya adalah *Geospatial Analytics*, *Dashboard Visualization*, *Early Warning System*, dan *Predictive Analytics*, di mana fitur-fitur tersebut akan menjadikan *Command Centre* menjadi optimal dan produktif.

Solusi SKOTA Data by Lintasarta tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi *Command Centre* yang dimiliki oleh Pemerintah daerah saja, tetapi juga bisa diperuntukkan untuk institusi lain seperti enterprise bisnis atau korporasi yang menggunakan *Command Centre* sebagai pendukung operasionalnya.

CONCLUSIONS

Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada petugas *Command Center* terkait penggunaan aplikasi **SIKAD** yang merupakan alat penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jambi.

Pentingnya aplikasi SIKAD terletak pada kemampuannya untuk menyajikan informasi secara real-time, memungkinkan petugas untuk merespons situasi yang berkembang dengan cepat dan tepat. Selama sesi sosialisasi, petugas *Command Center* menunjukkan antusiasme yang tinggi dan respons positif terhadap aplikasi ini, menyadari bahwa aplikasi tersebut akan sangat mendukung kinerja mereka dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari.

Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat kapabilitas petugas *Command Center* dalam menggunakan aplikasi SIKAD, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan. Sebagai tindak lanjut, diharapkan petugas terus melatih diri untuk menguasai aplikasi ini dan dapat memanfaatkannya dengan optimal dalam setiap situasi keamanan yang terjadi.

ACKNOWLEDGMENT

Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Adiwangsa Jambi dan pihak POLDA Jambi atas dukungan penuh yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.